

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DANA
PERIMBANGAN, DAN SILPA TERHADAP BELANJA
MODAL**

(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020)

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

NIM : 31401800072

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DANA
PERIMBANGAN, DAN SILPA TERHADAP BELANJA
MODAL**

(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018 -2020)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

NIM : 31401800072

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DANA
PERIMBANGAN, DAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 –
2020.**

Disusun Oleh:

Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

NIM : 31401800072

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 7 April 2022

Dosen Pembimbing



Drs. Osmad Muthaher, Msi.

NIK : 210403050

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL

Disusun Oleh:

Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

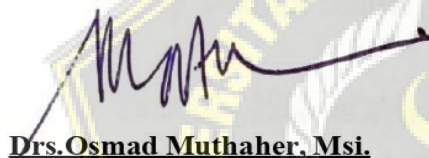
Nim : 31401800071

Telah dipertahankan didepan penguji

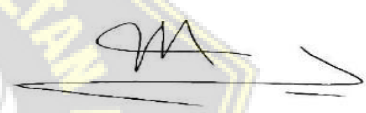
Pada tanggal 22 April 2022

Susunan Dewan Penguji

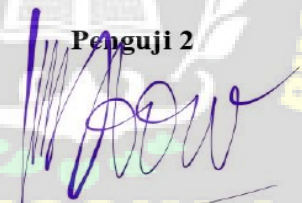
Pembimbing


Drs. Osmad Muthafer, Msi.
NIK.21043050

Penguji 1


DR. Zaenal Alim A. SE., MSI., Akt., CA
NIK.211492005

Penguji 2


Hendri Setyawan, SE, MPA
NIK. 211406019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 22 April 2022

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Dra. Hj. Winarsih, Se. Msi.

NIK.211415029

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

NIM : 31401800072

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020”** adalah benar – benar karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam proposal penelitian ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah, apabila dikemudian hari terbukti proposal penelitian ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 7 April 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 2000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Indonesian national flag and the text 'SERBUHAN RUPIAH', 'TEL', '2000', 'METERAI TEMPEL', and 'DD4AJX972211925'.

Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

NIM : 31401800072

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Iin Dyah Ayu Kusumaningrum
NIM	: 31401800072
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat Asal	: Ds. Kebonturi RT.002 RW.001 Kec.Jaken Kab.Pati
Email	: iindyahayu30@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disetasi*~~ dengan judul : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Belanja Modal”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media internet lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari kemudian terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 April 2022

Yang Menyatakan



Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

31401800072

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Tidak akan pernah tertukar apa yang sudah Allah SWT takar, tugas kita hanya meminta pertolongan dengan menengadahkan tangan, sisanya biarlah Allah SWT yang turun tangan”

“Setiap orang memiliki ukuran sepatu masing-masing, jangan samakan ukuran sepatumu dengan sepatu orang lain yang justru dapat membuat kakimu terluka”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak tercinta
- Keluarga besar tercinta
- Sahabat dan teman-temanku tercinta

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAHU HASIL, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (sensus sampling) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah 105 sampel. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS 22. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, LOCAL NATIVE INCOME, BAHU FUNDS, AND THE REMAINING MORE BUDGET FINANCING TOWARDS THE CAPITAL EXPENDITURE OF THE CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT.

The study aims to examine the influence of economic growth, local native income, revenue sharing funds and the rest of the budget financing on capital expenditures. Capital expenditure is a budget expenditure for the acquisition of fixed assets and other assets that benefit from more than one accounting period and exceed the minimum limit of capitalization of fixed assets / other assets set by local governments, namely equipment, buildings, infrastructure and other fixed assets. The population in this study is all districts / cities in Central Java Province. Samples in research use saturated sample retrieval techniques (census sampling) i.e. all members of the population are used as samples. The number of samples used is 105 samples. The methods in this study used descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis using SPSS 22 software. The results of this study showed that variable economic growth, local native income and revenue sharing funds had a significant positive effect on capital expenditure, while the remaining variables over budget financing had a negative effect on capital expenditure.

Keywords: economic growth, local native income, revenue sharing funds, remaining over budget financing, capital expenditure.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan petunjuk dan bimbingan serta berbagai kenikmatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020”**. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a baik diucapkan secara langsung maupun tidak langsung kepada:

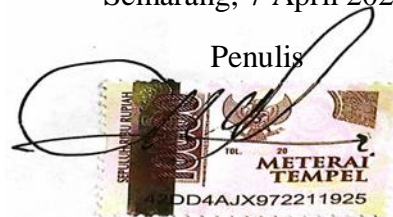
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya.
2. Ibu Prof Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si. Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Drs. Osmad Muthaher, MSi. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan kepada penulis.
5. Bapak, ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Kepada Kedua Orang tua, Bapak Minarto dan Ibu Saijah, yang tiada henti memberikan dukungan dan do'a restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Kakak Laki – laki ku Hendri Prabowo Saputro dan Adik Perempuan Nur Aini Sri Habsari Putri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat – sahabatku terkasih Dimas, Tika, Jazul, Sekar, Ayuk, Farach, Ita, Fanayla, Ina, Meida yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan menemani perjalanan menyelesaikan skripsi, terimakasih banyak atas semua bantuannya.
9. Dan bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis Menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan ini. Akhir kata, penulis berharap agar proposal usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Semarang, 7 April 2020

Penulis



Iin Dyah Ayu Kusumaningrum

NIM : 31401800072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Peneliti	10

BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship theory</i>).....	12
2.1.2 Belanja Modal.....	13
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	15
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.1.5 Dana Bagi Hasil (DBH).....	19
2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	20
2.2. Penelitian Terdahulu.....	21
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	25
2.4. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Populasi dan sampel.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5 Variabel dan Indikator.....	33
3.6 Teknik Analisis.....	36
BAB IV.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43

4.1	Gambaran Umum Variabel.....	43
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.3	Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1	Uji Normalitas	46
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	47
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	49
4.3.4	Uji Autokorelasi	50
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
4.5	Pengujian Hipotesis.....	53
4.5.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	53
4.5.2	Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	54
4.6	Pembahasan Penelitian	56
BAB V.....		60
KESIMPULAN		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		68

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 2 Kolmogrov-Smirnov Test	47
Tabel 4. 3 Uji Multikolonieritas	48
Tabel 4. 4 Uji Korelasi	50
Tabel 4. 5 Uji Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi	54
Tabel 4. 7 Uji Signifikansi Parsial (t)	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot).....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui belanja modal. Menurut Peraturan Kementrian Keuangan 127/PMK,02/2015 (2015) belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing – masing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang pendoman Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa penganggaran belanja modal harus didasarkan pada keyakinan adanya sumber penerimaan untuk mendanai belanja tersebut. Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang

diterima. Permendagri No 13 Tahun 2006 (2006) menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber – sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya Pendapatan daerah yang diterima.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dari komponen belanja langsung yang sifatnya menambah investasi atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pemanfaatan aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik berupa infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, rambu – rambu lalu lintas, jembatan, trotoar, stadion, sedangkan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh publik atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti gedung pemerintahan.

Pemerintah menyebutkan bahwa belanja modal menjadi salah satu instrument utama untuk mengerakkan roda perekonomian, menambah perolehan asset produktif, serta mendorong investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Apa lagi ditengah situasi pandemi Covid 19 saat ini, pemerintah dan masyarakat saling membantu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang terkoreksi. Berikut ini adalah tabel Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 -2020.

Tabel 1.1

Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2018	1.900.132.884.000	1.681.752.306.368	(218.380.557.638)
2019	2.381.120.174.000	2.100.465.846.975	(280.654.327.025)
2020	1.057.533.752.000	996.994.505.160	(60.539.246.840)

Sumber: Laporan Keuangan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 memiliki anggaran sebesar Rp.1.900.132.884.000 dengan realisasi Rp.1.681.752.306.368, tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp.2.381.120.174.000 dengan realisasi Rp.2.100.465.846.975 dan di tahun 2020 mengalami penurunan dimana anggaran sebesar Rp.1.057.533.752.000 dengan realisasi Rp.996.994.505.160. Terjadi penurunan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Seiring dengan perubahan dampak covid – 19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak covid – 19 (kementrian keuangan, 2020).

Banyak faktor yang mempengaruhi belanja modal, faktor pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (2011) Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Pemberian otonomi daerah daerah berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Kenyataannya yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata justru tidak diikuti dengan adanya peningkatan belanja modal, hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal dibandingkan dengan belanja pengawai.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari – hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Terkait dengan hal ini, Egi Nofrizal, Akhsanul Haq, Sigit Edi Surono (2006) yang melakukan penelitian untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Said Yunus dan Amirullah

(2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Faktor kedua yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah (Carunia Mulya Firdausy, 2017).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2014) salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Setiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Semakin tinggi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam Menyusun anggaran belanja modal yang bertujuan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk publik. Pembangunan

dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu, investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Yani Rizal (2019) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal. Namun penelitian yang dilakukan oleh Adyatma, Oktaviani (2015) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi belanja modal adalah Dana Perimbangan. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2014) Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda – beda untuk mendanai kegiatannya, sehingga hal ini sering kali menjadi penyebab adanya ketimpangan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan fiskal pemerintah membantu keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan

pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan infrastruktur dan sarana prasaranan.

Salah satu jenis Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2014) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumberpendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

Terkait dengan hal ini, Sarah Frantika, Sofyan, Shinta Budi (2021) yang melakukan penelitian untuk menguji apakah DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian mengatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Sedangkan Rarnawati, Fajar (2017) DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sisa lebih pembiayaan anggaran

merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) 01 menyebutkan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Menurut Aziz Rachman, Irwan Taufiq (2015) Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SILPA.

Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Belanja modal merupakan salah satu realisasi yang terdapat di dalam SILPA. Apabila belanja modal ditahun yang akan datang tinggi atau meningkat dan tidak dapat ditutupi oleh penerimaan daerah maka SILPA dapat dipergunakan untuk menutupinya. Terkait dengan hal ini, Faraliza Micola (2020) yang melakukan penelitian untuk menguji apakah SILPA berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian menyatakan SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian Kristin Loren Habeabah (2018) SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sari, Putu Dan Novitasari (2017), dengan waktu, obyek yang berbeda namun dengan variabel dan alat analisis yang sama. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Putu, dan Novitasari dengan penelitian ini terletak pada objek dan variabel yang diteliti, yaitu tidak memasukkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBNGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2020 “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020?
3. Bagaimana Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2020?

4. Bagaimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.
3. Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.
4. Mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.

1.4 Manfaat Peneliti

1. Aspek Teoritis

Bagi pengembang ilmu, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempelajari pengalokasian sumber – sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai gambaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan sumber – sumber pendapatan daerah secara lebih produktif, tentunya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana publik. Pemerintah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana publik dengan meningkatkan presentase pengalokasian belanja modal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Teori stewardship menurut Said (2015) merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Pada *stewardship theory, model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia melayani. Pada teori ini stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organizational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara principal dan steward tidak sama, steward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpendoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan (Thornton D 2009). Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya, sehingga sudah sewajarnya instansi memberikan pelayanan yang baik dikarenakan sumber daya yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan operasional berasal dari masyarakat. motivasi individu untuk melakukan suatu tindakan pada suatu instansi maupun perusahaan digambarkan secara jelas dalam teori ini yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada prinsipal. Penanaman nilai yang terkandung dalam teori ini akan memberikan dampak yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat.

2.1.2 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (2020) tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Belanja modal adalah anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan irigasi dan bangunan, dan asset tetap lainnya.

Menurut PMK Nomor 127 Tahun 2015 (2015), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas

minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 (2015) pasal 53 Belanja modal di pergunakan untuk antara lain:

- a) Belanja modal tanah, seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b) Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pergantian/ dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta investasi kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pergantian/ dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan, pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas gedung sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi sering kali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi diantara sektor – sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan oleh bertambahnya faktor – faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan

masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. “secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan produk domestik regional daerah/ PBRD” (Saragih, 2013).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk menggali dan menghasilkan sumber – sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena kemandirian keuangan daerah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2012).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 (2004) salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 (2009) PAD adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan UU yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pembagian jenis pajak daerah, adalah:

- Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air dipermukaan.
 - e) Pajak rokok.
- Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri dari:
 - a) Pajak hotel
 - b) Pajak Hiburan
 - c) Pajak restoran
 - d) Pajak reklame
 - e) Pajak parkir
 - f) Pajak penerangan jalan
 - g) Pajak mineral bukan logam dan bahan batuan
 - h) Pajak sarang burung wallet
 - i) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut UU 28 Tahun 2009 (2009) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah meliputi:

- Jasa umum, adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Jasa usaha, adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip, komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian barang.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini terperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau milik kelompok usaha masyarakat.

4. Dan lain – lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain – lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. PAD bertujuan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah secara mandiri yang menjadi sumber pendanaan daerah sebagai perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

2.1.5 Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2014) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil

(DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil (DBH) ini ditinjau dari potensi daerah penghasil. Daerah yang memiliki sumber daya melimpah tentunya akan mendapat persentase yang lebih besar dari pada daerah yang memiliki sedikit sumber daya alamnya.

2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan

daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka bisa terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari, Putu, Novitasari (2017)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal kabupaten/ kota se-Bali	Pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2	Ardiyani Ika Sulistyawati,	Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana	PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja pegawai berpengaruh

	Nugrah Septiyani Purwanti (2021)	perimbangan, dan belanja pegawai terhadap belanja modal.	positif terhadap belanja modal.
3	Dimas Arief Prasetyo, Dedi Rusdi (2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
4	Sri Ayem, Dessy Dyah Pratama (2018)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan Pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi daerah istimewa Yogyakarta periode 2011 – 2016.	Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5	Muhammad Syukrin, Hianaya (2019)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal kabupaten & kota provinsi Sulawesi selatan.	Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap belanja modal.
6	Safiul Huda, Ati Sumiati (2019)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah.	PAD dan Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
7	Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani (2019)	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada	Pertumbuhan ekonomi, PAD, DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

		pemerintah Kabupaten & kota Banda Aceh)	
8	Nurur Rohmah, Ikhsan Budi Riharjo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan luas wilayah terhadap belanja modal (studi pada Kabupaten & kota se Provinsi Jawa timur 2013 – 2017)	Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal
9	M. Agus Sudrajhat, Irma Diastuti (2017)	Analisis pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Kabupaten Ngawi 2003 – 2015.	PAD, DBH, DAU dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
10	Vinny Siti Utary (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah daerah kota sukabumi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal terhadap pemerintah daerah kota sukabumi.

2.3. Pengembangan Hipotesis

1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah setempat akan meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat, Purniawati (2018) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka belanja modal akan semakin tinggi pula. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jadi bisa dihasilkan alternatif hipotesis seperti berikut;

H_1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan asli daerah dimana perannya penting bagi belanja modal daerah. Jika semakin tinggi PAD yang didapatkan daerah maka semakin menunjukkan kemandirian

suatu daerah tersebut. Kemudian dengan PAD ini diharapkan pemerintah dapat mengelola belanja modal suatu daerah dan dapat memaksimalkannya untuk memenuhi fasilitas masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathia, Dedi Rusdi (2020) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan jika pemerintah menginginkan adanya peningkatan belanja modal yang besar maka pemerintah daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar – besarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan jadi bisa dihasilkan alternatif hipotesis seperti berikut:

H_2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan ke pemerintah daerah berdasarkan presentase tertentu dengan memperhatikan potensi yang dihasilkan daerah tersebut. Adanya DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut akan membantu meningkatkan anggaran belanja modal pada suatu daerah, sehingga sarana dan prasarana akan terus meningkat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya, Dina, Maryono (2018) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki

pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja modal, sehingga kenaikan atau penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) akan mempengaruhi pula kenaikan atau penurunan belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan jadi bisa dihasilkan alternatif hipotesis seperti berikut:

H_3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal.

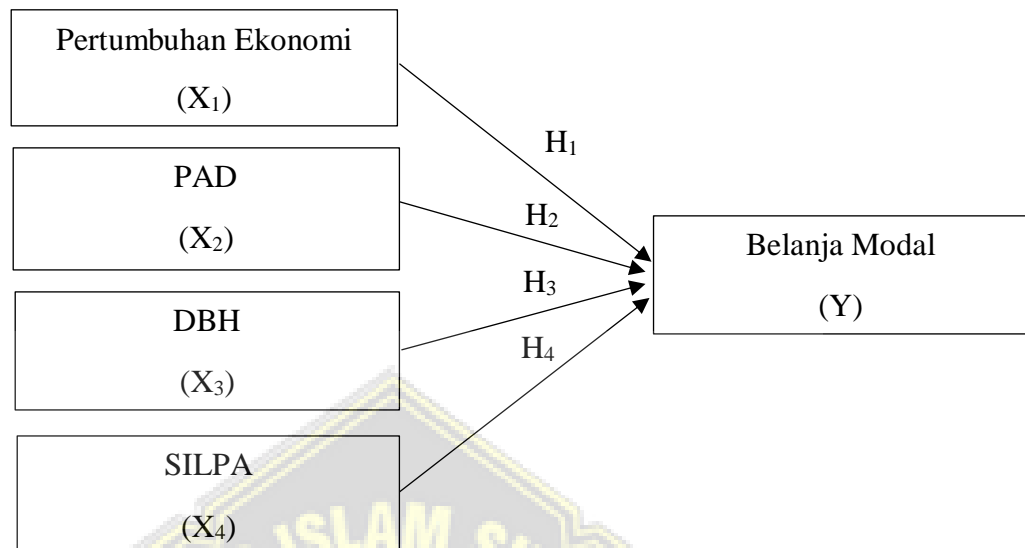
4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 (2006) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah suatu sisa dana yang perolehannya berasal dari aktualisasi pengeluaran dan penerimaan anggaran suatu daerah dalam satu periode. SILPA digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pernyataan investasi dan transfer rekening cadangan. SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah.

Menurut Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Nuramalia, Agung (2020) menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan jadi bisa dihasilkan alternatif hipotesis seperti berikut:

H_4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat di uraikan bahwa Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mempengaruhi belanja modal baik secara persial maupun simultan. Dengan kata lain Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Leboh Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan variabel independen yang akan mempengaruhi belanja modal sebagai variabel dependen.

Keterangan:

H₁ = Variabel Independen 1, Pertumbuhan Ekonomi

H₂ = Variabel Independen 2, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H₃ = Variabel Independen 3, Dana Bagi Hasil (DBH)

H₄ = Variabel Independen 4, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Y = Variabel Dependen, Belanja Modal

 = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini bersifat assosiatif (hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel independent yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_4) dan variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y).

3.2 Populasi dan sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota pada tahun 2018 – 2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (sensus sampling) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian jumlah sampel dari penelitian ini adalah 105 sampel (35 dikali 3 tahun). Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Produk regional Bruto atas dasar harga konstan pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018 – 2020.

Tabel 3 1

Populasi dan Sampel penelitian

No	Kabupaten/ Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kota Semarang	19	Kabupaten pematang
2	Kota Salatiga	20	Kabupaten Klaten
3	Kota Tegal	21	Kabupaten Demak
4	Kota Pekalongan	22	Kabupaten Karanganyar
5	Kota Magelang	23	Kabupaten Brebes
6	Kota Surakarta	24	Kabupaten Banjarnegara
7	Kabupaten Boyolali	25	Kabupaten Wonosobo
8	Kabupaten Sragen	26	Kabupaten Banyumas
9	Kabupaten Pati	27	Kabupaten Grobogan
10	Kabupaten Rembang	28	Kabupaten Semarang
11	Kabupaten Jepara	29	Kabupaten Batang
12	Kabupaten Blora	30	Kabupaten Cilacap
13	Kabupaten Kudus	31	Kabupaten Kebumen
14	Kabupaten Wonogiri	32	Kabupaten Temanggung
15	Kabupaten Purbalinga	33	Kabupaten Kendal
16	Kabupaten Purworejo	34	Kabupaten Magelang
17	Kabupaten Tegal	35	Kabupaten Sukoharjo
18	Kabupaten Pekalongan		

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang di ukur dengan skala numerik. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Laporan Realisasi APBD tahun 2018 – 2020, yang diperoleh dari situs Direktorat Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui situs resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/> . Dari laporan APBD tahun 2018 – 2020 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui website resmi <https://jateng.bps.go.id> periode 2018 – 2020.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder dari dokumen laporan realisasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah periode 2018 – 2020. Yang diperoleh dari situs Direktorat Jendal Perimbangan Keuangan

Pemerintah Daerah dan situs Badan Pusat Statistik melalui situs website <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/>.

3.5 Variabel dan Indikator

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berikut penjelasannya:

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen disebut juga variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yang diteliti, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan input perkapital yang terus menerus dalam jangka Panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapital, yang dilakukan dengan perhitungan:

$$1) \text{ PDRB}_t = \text{Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang}$$

$$2) \text{ PDRB}_{t-1} = \text{Produk Domestik Bruto Tahun Sebelumnya}$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / (\text{PDRB}_{t-1}) \times 100\%$$

2. Pendapatan Asli Daerah (X₂)

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 (2004) Pendapatan Asli Daerah, yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Indikator dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:

PAD = total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain pendapatan daerah yang sah.

3. Dana Bagi Hasil (X₃)

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 (2004) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator dalam pengukuran Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilakukan dengan perhitungan:

- 1) DBH Pajak
- 2) DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

DBH dapat diukur dengan perhitungan:

DBH = Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_4)

Menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 (2021), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain – lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Indikator dalam pengukuran SILPA dapat dilakukan dengan perhitungan:

3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering juga disebut dengan variabel terikat yang merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen, yaitu:

1. Belanja Modal

Menurut PMK Nomor 127 Tahun 2015 (2015), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi dalam melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan dan infrastruktur dan harta tetap lainnya. Indikator dalam pengukuran belanja modal dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{SILPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

3.6 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 2016 – 2020, Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Untuk uji asumsi klasik menggunakan 4 (empat) uji yaitu, uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas, kemudian pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t (Uji t). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 25.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum dan minimum, sum, range kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang

digunakan yaitu, nilai maksimum dan minimum, rata – rata dan standar deviasi dari klasifikasi masing – masing variabel.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan salah satu pengujian prasyarat pada regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari:

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018).

Uji normalitas dilakukan dengan grafik histogram dan normal probability plot dimana dilakukan perbandingan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula One – Sample Kolmogorov Smirnov dengan tingkat signifikan 0,05. Dasar pengambilan keputusan:

1. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

B. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan salah satu bentuk syarat dari uji asumsi klasik. Tujuan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji

apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Menurut Ghazali (2018), tujuan uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Deteksi terhadap multikolonieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji persial masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Mendeteksi multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih dari 10 ($VIF > 10$) dan nilai tolerance lebih kecil atau kurang dari 0,10 ($Tol < 0,10$) maka dapat dikatakan terjadi multikolonieritas (hubungan yang kuat antara variabel independen). Sedangkan jika VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 ($Tol > 0,10$) maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu bentuk syarat dari uji asumsi klasik. Menurut Ghazali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji

pada model regresi dimana ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau tidak. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika terjadi homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksinya adalah dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara variabel terikat dengan variabel residualnya, dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yang diambil sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk suatu pola teratur (bergelombang, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada yang jelas serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$.

Uji autokorelasi merupakan salah satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak mempunyai hubungan dengan

variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik jika tidak memiliki masalah autokorelasi apabila pengaruh faktor pengganggu yang terjadi didalam satu periode waktu pengamatan tidak berpengaruh oleh periode lainnya, sebaliknya dikatakan tidak layak apabila masalah autokorelasi muncul ketika terdapat saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan periode pengamat.

Metode yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah menggunakan pengujian dengan uji Durbi-Watson (Uji DW) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW dibawah -2 berarti autokorelasi positif.
- 2) Bila nilai DW diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi.
- 3) Bila nilai DW diatas +2 berarti autokorelasi negative.

3.6.3 Metode Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda akan menguji seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DBH dan SILPA terhadap belanja modal.

Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β_{1-4} = Koefisien Regresi

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = Pendapatan Asli Daerah

X₃ = Dana Bagi Hasil

X₄ = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

e = kesalahan error

3.6.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variansi variabel - variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan adjusted R^2 saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model penelitian (Ghozali, 2018).

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistis t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig $< 0,05$ maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan H_a diterima.
2. Jika nilai sig $> 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan. Artinya H_a ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Variabel

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020 sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh peneliti. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/ dan kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan APBD kabupaten/kota yang diperoleh dari dari situs resmi Direktorat Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui situs resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Dan situs resmi Badan Pusat Statistik melalui website resmi <https://jateng.bps.go>. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh (sensus sampling) dengan kriteria sampel sebagai berikut:

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau informasi data yang sedang diteliti melalui populasi dan sampel. teknik statistik deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data dengan perhitungan untuk mengklarifikasi keadaan atau karakteristik data yang dimaksud. Penjelasan kelompok dalam statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata (mean) dan standar deviasi dari masing – masing

variabel. Berikut adalah hasil dari analisis statistik deskriptif yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	105	-.126	.085	.02909	.040110
PAD	105	115530759532	3958842441135	451491660079.13	524265791228.95
DBH	105	17113151303	1989186685151	99654581752.63	315309465894.82
SILPA	105	22624206194	1987446953259	190043096995.30	204711343664.49
BELANJA MODAL	105	102083054523	1228459434270	340926300709.70	168702528337.38
Valid N (listwise)	105				

Sumber: data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah unit analisis (N) dalam penelitian ini sebanyak 105 Unit analisis yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah, yang melaporkan Produk Domestik Regional Bruto pada website (<https://jateng.bps.go.id>) dan yang melaporkan Laporan Realisasi APBD pada website (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>) pada periode tahun 2018 – 2020. Tabel 4.1 menjelaskan bahwa:

1. Nilai minimum Pertumbuhan Ekonomi adalah -0,126 yang diperoleh di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020, nilai maksimum 0,085 yang diperoleh di Kabupaten Pati pada tahun 2019, nilai rata – rata (*mean*) 0,02909 dan nilai standar deviasi sebesar 0,040110. Nilai Std. Deviasi > Mean berarti terjadi penyimpangan data. Dan nilai mean tidak dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

2. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah Rp.115.530.759.532 yang diperoleh di Kota Magelang pada tahun 2020, nilai maksimum Rp. 3.958.842.441.135 yang diperoleh dari Kabupaten Klaten pada tahun 2018, nilai rata – rata (mean) Rp.451.491.660.079,13 dan nilai standar deviasi sebesar Rp.524.265.791.228,952. Nilai Std. Deviasi > mean berarti terjadi penyimpangan data. Dan nilai mean tidak dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
3. Nilai minimum Dana Bagi Hasil Rp. 17.113.151.303 yang diperoleh dari Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019, nilai maksimum Rp. 1.940.807.939.392 yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap tahun 2018, nilai rata – rata (mean) Rp.99.654.581.752,63 dan nilai standar deviasi sebesar Rp.315.309.465.894,819. Nilai Std. Deviasi > mean berarti terjadi penyimpangan data. Dan nilai mean tidak dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
4. Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 22.624.206.194 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas tahun 2019, nilai maksimum Rp. 1.987.446.953.259 yang diperoleh dari Kabupaten Karanganyar tahun 2019, nilai rata – rata (mean) Rp.5.886.557.952.248,7 dan nilai standar deviasi sebesar Rp.58.412.519.625.148,809. Nilai Std. Deviasi > mean berarti terjadi penyimpangan data. Dan nilai mean tidak dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
5. Nilai Belanja Modal Rp. 102.083.054.523 yang diperoleh dari Kabupaten Temanggung pada tahun 2020, nilai maksimum Rp.

1.054.761.429.772 yang diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2019, nilai rata – rata (mean) Rp.340.926.300.709,70 dan nilai standar deviasi sebesar Rp.168.702.528.337,379. Nilai Std. Deviasi < mean berarti tidak terjadi penyimpangan data. Dan nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Selain itu, untuk mendapatkan model regresi linear berganda yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai jika memenuhi asumsi klasik.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan data yang diteliti dapat digunakan dalam analisis model regresi linear. Setelah data yang diteliti lolos dalam uji asumsi klasik, uji regresi akan dilakukan untuk melihat tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji-uji yang dilakukan dalam uji asumsi klasik terbagi menjadi:

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogorov-Smirnov Test, dengan tingkat signifikan $> 0,05$. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan data 105 sampel:

Tabel 4. 2
Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000067
	Std. Deviation	1.35221E+11
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.060
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 ^e

Sumber: olah data SPSS, 2022

Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari Kolmogorov Smirnow menunjukkan hasil sebesar $0,076 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data sekunder yang di olah berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat adanya korelasi atau hubungan diantara variabel independent satu dengan lainnya. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya korelasi variabel independent satu dan yang lain dapat diketahui dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika Nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka dapat diartikan bahwa terdapat adanya pengaruh multikolinearitas pada penelitian tersebut. Berikut hasil pengujian uji multikolinearitas yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PDRB	.949	1.053
PAD	.982	1.018
DBH	.946	1.058
SILPA	.986	1.014

Sumber: olah data SPSS, 2022

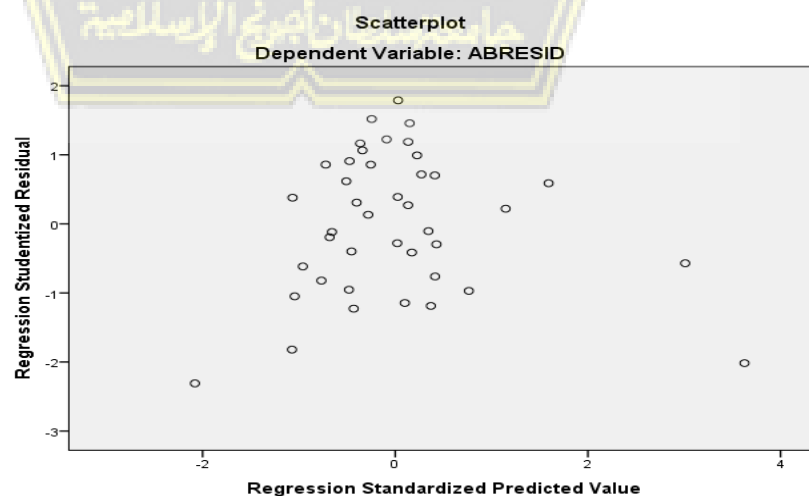
Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pada variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai tolerance sebesar $0,949 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,053 < 10$. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tolerance sebesar $0,982$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,018 < 10$. Variabel Dana Bagi Hasi (DBH) memiliki nilai tolerance sebesar $0,946 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,058 < 10$. Selanjutnya variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang memiliki nilai tolerance sebesar $0,986 < 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,014 < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi korelasi dan model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas pada data yang diambil.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized (Ghozali, 2018). Dasar analisisnya yaitu :

1. Jika pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk suatu pola teratur (bergelombang, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada yang jelas serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: olah data SPSS, 2022

Gambar 4. 1

Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu teknik pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi diantara variabel satu dengan yang lain yang terdapat didalam model regresi dengan berdasarkan perubahan waktu. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan salah satu teknik pengujian yaitu dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Model regresi yang baik dalam penelitian adalah tidak terdapat autokorelasi pada data tersebut, syarat tidak terjadi autokorelasi yaitu jika nilai $DW > DU$ dan $DW < 4-DU$.

Tabel 4. 4

Uji Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.598 ^a	.358	.332	1.379E+11	2.714

Sumber: olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 2,714. Nilai ini lebih kecil dari DU yaitu sebesar 1,7617. Selain itu nilai *Durbin-Watson* lebih kecil dari 4-

1,7617= 2,2383. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $2,714 > 1,7617$ dan $2,714 < 2,2383$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi linear yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hasil persamaan regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.679	.646		9.993	.000
	PDRB	.215	.435	.365	4.435	.000
	PAD	.120	.026	.373	4.613	.000
	DBH	.169	.044	.316	3.833	.000
	SILPA	-.053	.067	-.064	-.796	.428

Sumber: olah data SPSS, 2022

Dari hasil output regresi diatas didapat persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,679 + 0,215 X_1 + 0,120 X_2 + 0,169 X_3 + (-0,053 X_4) + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Pendapatan Asli Daerah
- X3 = Dana Bagi Hasil
- X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- e = Error

Dari persamaan regresi yang sudah didapatkan diatas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi bernilai 0,215 (bernilai positif), berarti pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berdampak akan meningkatkan belanja modal.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai 0,120 (bernilai positif), berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi berdampak akan meningkatkan belanja modal.
3. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai $-0,169$ (bernilai positif), berarti Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Dana Bagi Hasil (DBH) yang semakin tinggi akan berdampak meningkatnya belanja modal.
4. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) bernilai $-0,053$ (bernilai negatif), artinya SILPA memiliki pengaruh yang negative terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

yang semakin tinggi tidak berdampak akan meningkatkan belanja modal.

4.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda. Data diolah dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

4.5.1 Koefisien Determina (R^2)

Nilai koefisien korelasi R menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dapat dikatakan kuat apabila nilai R berada diatas 0,5 dan mendekati 1.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. *Nilai adjusted R square* adalah nol sampai dengan satu. Apabila *nilai adjusted R square* semakin mendekati satu, maka variabel – variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya semakin kecil *nilai adjusted R square*, maka kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas. *Nilai adjusted R square* memiliki kelemahan yaitu *nilai adjusted R square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakan *nilai adjusted R square* untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tabel 4. 6
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.598 ^a	.358	.332	137898698037

Sumber: olah data SPSS, 2020

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa *nilai adjusted R square* sebesar 0,358 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen. Artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran mampu dijelaskan oleh variabel belanja modal sebesar 35,8%.

4.5.2 Uji Signifikasi Parsial (Uji-t)

Uji statistis t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05 maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu koefisien regresinya, jika arah nya sesuai dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan Ha diterima.
2. Jika nilai sig > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan. Artinya Ha ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 7
Uji Signifikansi Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.679	.646		9.993	.000
PDRB	.215	.435	.365	4.435	.000
PAD	.120	.026	.373	4.613	.000
DBH	.169	.044	.316	3.833	.000
SILPA	-.053	.067	-.064	-.796	.428

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan hasil tabel 4.7 maka dapat diinterpretasikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal berdasarkan tabel diatas, memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,215 dan t hitung sebesar 4,435 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi mampu berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal adalah diterima.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal berdasarkan tabel diatas, memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,120 dan t hitung sebesar 4,613 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal adalah diterima.
3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal berdasarkan tabel diatas memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini dibuktikan dengan

koefisien regresi sebesar 0,169 dengan t hitung sebesar 3,833 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mampu berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal adalah diterima

4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal berdasarkan tabel diatas, memiliki pengaruh negative tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar -0,053 dengan t hitung sebesar 0,796 dan nilai signifikansi sebesar $0,428 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mampu berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal adalah ditolak.

4.6 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui berbagai pengujian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 6,415 dan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05 yang artinya hipotesis pertama diterima.

Adanya pengaruh positif yang terjadi antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal memiliki pengertian bahwa semakin tinggi

Pertumbuhan Ekonomi, maka semakin tinggi pula yang akan dialokasikan bagi belanja modal oleh pemerintah daerah. Dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dapat membuat Pemerintah Daerah semakin memanfaatkan keadaan untuk memperbaiki kinerja belanja modal dalam berbagai aspek agar belanja modal dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Agus dan Irma (2018) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 4,607 dan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05 yang artinya hipotesis kedua diterima.

Adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, maka alokasi Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah pun lebih tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutamanya pembangunan

infrastruktur. Dengan ditemukannya hasil penelitian ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menggali potensi penerimaan daerahnya secara maksimal

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian sudah dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 3,951 dan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05 yang artinya hipotesis ketiga diterima.

Adanya pengaruh Positif Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihasilkan daerah, maka semakin besar peluang untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut akan membantu meningkatkan anggaran belanja modal pada suatu daerah, sehingga sarana dan prasarana akan terus meningkat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Dedi Rusdi (2021)

yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

d. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,798 dan nilai signifikansi 0,427 lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05 yang artinya hipotesis ke empat ditolak.

Adanya pengaruh yang negatif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa besar kecilnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak mempengaruhi belanja modal karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak selalu ada pada laporan APBD dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang ditahun sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tidak digunakan untuk membiayai belanja modal ditahun berikutnya, karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan di daerah tersebut lebih kecil daripada realisasinya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Kharismadani dan Yanita Hendarti (2019) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode analisis linear berganda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi, maka semakin tinggi pula yang akan dialokasikan bagi belanja modal oleh pemerintah daerah. Dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dapat membuat Pemerintah Daerah semakin memanfaatkan keadaan untuk memperbaiki kinerja belanja modal dalam berbagai aspek agar belanja modal dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari potensi wilayahnya sendiri. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah dapat menjadi indikator kemandirian daerah yang berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki

daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahannya termasuk pemenuhan kebutuhan Belanja Modal.

3. Dana Bagi Hasil (DBH) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, karena semakin besar Dana Bagi hasil (DBH) yang dihasilkan daerah, maka semakin besar peluang untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut akan membantu meningkatkan anggaran belanja modal pada suatu daerah, sehingga sarana dan prasarana akan terus meningkat.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, karena besar kecilnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak mempengaruhi belanja modal karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak selalu ada pada laporan APBD dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang ditahun sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tidak digunakan untuk membiayai belanja modal ditahun berikutnya, karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan di daerah tersebut lebih kecil daripada realisasinya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan dalam penelitian – penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kota tertentu, yaitu hanya menggunakan data pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku bagi Pemerintahan penelitian atau belum dapat digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.
2. Dilihat dari nilai *adjusted R square* yang hanya sebesar 35,8 % menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang mampu menjelaskan pengaruh terhadap belanja modal.

5.3 Saran

Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 35,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 64,2% variabel independent lain yang dapat mempengaruhi belanja modal yang belum diteliti dalam penelitian ini. Maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain misalnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, luas wilayah, belanja operasional, belanja pegawai dan masih banyak lagi yang sekiranya mampu mempengaruhi belanja modal.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Disarankan agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau informasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah disarankan agar menggunakan penelitian ini untuk menganalisa dan memaksimalkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam Belanja Modal.



No	Tahun	Kabupaten/Kota	PE	PAD	DBH	SILPA	B
1	2018	kota salatiga	5,8	208.926.057.032	24.417.997.942	258.254.809.426	2
2	2018	kota pekalongan	5,69	179.224.408.698	26.693.031.431	87.028.207.176	1
3	2018	kota semarang	6,48	1.821.274.103.250	168.784.359.874	176.328.459.834	1
4	2018	kota magelang	5,46	249.873.268.826	24.423.094.444	134.410.439.444	2
5	2018	kota surakarta	5,75	525.125.554.686	47.513.325.057	188.622.166.304	5
6	2018	kota tegal	5,87	275.021.448.594	25.571.473.848	165.566.574.307	1
7	2018	kab boyolali	5,72	342.957.213.726	42.900.294.604	146.431.243.026	4
8	2018	kab klaten	5,47	3.958.842.441.135	41.131.449.124	395.394.684.312	3
9	2018	kab rembang	5,89	296.676.436.263	41.011.687.494	75.692.630.540	3
10	2018	kab banyumas	6,45	648.326.914.034	42.908.155.816	53.134.107.182	5
11	2018	kab semarang	5,67	384.475.678.133	40.449.487.507	181.106.149.672	4
12	2018	kab kudus	3,24	337.364.609.424	235.660.116.745	169.679.195.012	3
13	2018	kab pematang	5,69	300.481.887.079	30.316.210.113	312.401.992.664	2
14	2018	kab purworejo	5,33	286.971.590.024	25.827.467.718	107.111.633.638	3
15	2018	kab pati	5,71	384.041.846.939	33.452.113.433	244.577.769.290	4
16	2018	kab sukoharjo	5,79	433.485.481.219	26.507.198.592	310.182.333.525	3
17	2018	kab pekalongan	5,76	3.112.888.143.681	17.520.823.042	170.561.700.768	4
18	2018	kab cilacap	2,99	527.577.740.281	1.940.807.939.392	302.164.117.632	5
19	2018	kab karanganyar	5,98	343.156.496.167	38.881.727.988	49.427.397.948	2
20	2018	kab magelang	5,28	325.089.093.092	36.431.592.768	222.324.981.082	5
21	2018	kab demak	5,4	342.324.870.245	41.454.624.000	200.338.226.291	4
22	2018	kab batang	5,72	237.547.973.048	36.199.222.279	101.747.058.955	1

23	2018	kab banjarnegara	5,53	235.994.436.137	30.048.650.863	116.906.522.531	4
24	2018	kab brebes	5,26	346.907.972.510	32.660.114.961	178.309.799.004	5
25	2018	kab kendal	5,77	335.892.237.024	47.528.989.206	212.492.262.306	2
26	2018	kab grobongan	5,83	315.743.175.974	40.960.700.086	164.086.481.848	4
27	2018	kab kebumen	5,53	352.047.092.281	29.627.426.379	201.692.379.501	3
28	2018	kab sragen	5,75	334.303.284.344	27.428.743.938	277.929.572.973	4
29	2018	kab wonogiri	5,41	269.032.427.619	27.810.006.625	241.343.452.884	4
30	2018	kab temanggung	5,13	252.019.934.778	50.075.868.022	85.356.884.193	1
31	2018	kab wonosbo	5,06	226.819.478.601	34.626.572.812	255.341.911.472	3
32	2018	kab purbalingga	5,42	282.679.019.517	25.434.251.988	125.141.575.308	2
33	2018	kab blora	4,38	203.182.795.054	115.863.713.993	63.803.904.218	4
34	2018	kab jebara	5,85	369.330.454.700	39.836.895.561	107.256.511.653	3
35	2018	kab tegal	5,51	372.282.676.054	29.421.275.289	598.732.792.594	4
36	2019	kota salatiga	5,9	236.086.898.372	18.865.461.039	219.457.736.483	1
37	2019	kota pekalongan	5,5	212.777.435.293	19.027.230.900	95.101.710.311	1
38	2019	kota semarang	6,81	2.066.333.418.588	114.095.064.083	80.734.346.278	1
39	2019	kota magelang	5,44	273.582.932.151	19.159.017.863	107.045.397.946	2
40	2019	kota surakarta	5,78	546.020.008.117	32.359.858.700	105.310.864.321	5
41	2019	kota tegal	5,77	297.677.322.000	25.452.966.000	88.785.746.000	1
42	2019	kab boyolali	5,96	395.431.863.402	37.591.656.648	103.943.445.939	5
43	2019	kab klaten	5,5	311.648.401.655	41.131.449.124	382.909.001.110	3
44	2019	kab rembang	5,2	308.445.489.137	38.779.148.291	40.143.795.816	2
45	2019	kab banyumas	6,32	686.805.512.326	28.656.207.912	22.624.206.194	4

46	2019	kab semarang	5,39	431.412.970.525	32.240.120.367	175.630.364.280	3
47	2019	kab kudus	3,1	343.824.122.868	209.525.165.300	190.917.348.813	2
48	2019	kab pematang	5,8	350.559.139.753	24.594.205.886	347.906.316.058	3
49	2019	kab purworejo	5,44	280.395.155.599	19.577.301.012	87.840.209.775	3
50	2019	kab pati	5,86	363.997.151.178	24.894.731.590	200.858.279.012	4
51	2019	kab sukoharjo	5,92	458.742.223.869	17.113.151.303	420.458.357.396	3
52	2019	kab pekalongan	5,35	341.344.415.574	21.533.683.417	159.856.594.942	3
53	2019	kab cilacap	2,27	574.276.795.303	1.989.186.685.151	280.865.946.057	6
54	2019	kab karanganyar	5,93	387.763.013.239	29.554.921.489	1.987.446.953.259	2
55	2019	kab magelang	5,3	417.178.099.961	28.247.886.437	218.827.197.659	3
56	2019	kab demak	5,36	407.400.540.994	32.191.544.238	225.039.224.475	4
57	2019	kab batang	5,39	235.221.112.856	39.911.600.000	55.867.681.600	2
58	2019	kab banjarnegara	5,6	231.817.471.000	28.802.409.000	58.542.778.000	3
59	2019	kab brebes	5,72	372.172.398.000	34.001.487.000	112.817.499.000	6
60	2019	kab kendal	5,71	414.115.747.429	49.322.444.000	116.009.767.778	2
61	2019	kab grobongan	5,37	319.425.016.907	33.718.276.000	29.347.286.317	3
62	2019	kab kebumen	5,52	401.172.210.000	30.114.718.000	163.103.902.000	4
63	2019	kab sragen	5,9	318.667.208.000	26.933.232.000	105.458.038.644	1
64	2019	kab wonogiri	5,14	223.667.851.900	28.480.256.000	98.433.900.000	4
65	2019	kab temanggung	5,05	249.681.538.344	48.589.699.000	67.807.769.127	2
66	2019	kab wonosobo	5,61	211.013.295.214	33.952.458.000	175.473.355.266	4
67	2019	kab purbalingga	5,52	266.840.260.000	25.714.709.000	52.133.143.000	2
68	2019	kab blora	4,05	200.000.000.000	147.660.140.000	44.376.700.000	4

69	2019	kab jepara	6,02	359.893.706.000	43.142.391.000	34.001.120.000	2
70	2019	kab tegal	5,58	416.867.970.000	26.542.874.000	78.000.000.000	4
71	2020	kota salatiga	-1,68	219.539.400.332	26.534.964.997	155.741.332.512	1
72	2020	kota pekalongan	-1,87	229.868.197.597	86.191.083.532	112.542.563.826	1
73	2020	kota semarang	-1,61	2.024.537.808.307	162.253.291.857	288.545.560.942	5
74	2020	kota magelang	-2,45	290.756.816.510	28.425.592.273	251.514.967.769	1
75	2020	kota surakarta	-1,74	492.776.208.640	58.691.410.809	291.894.539.353	2
76	2020	kota tegal	-2,25	266.580.982.102	29.463.311.806	143.906.714.598	1
77	2020	kab boyolali	-1,24	451.543.582.894	43.264.796.147	133.810.972.513	4
78	2020	kab klaten	-1,18	329.963.261.898	41.978.389.803	440.659.044.325	1
79	2020	kab rembang	-1,49	326.670.124.350	53.487.240.918	65.325.181.073	1
80	2020	kab banyumas	-1,65	668.211.148.299	49.466.412.346	81.044.852.878	3
81	2020	kab semarang	-2,67	345.165.297.625	40.850.178.049	183.708.254.800	2
82	2020	kab kudus	-3,53	383.892.971.961	216.676.209.702	288.295.764.737	2
83	2020	kab pemalang	-0,66	328.375.466.698	34.286.816.480	123.924.362.435	3
84	2020	kab purworejo	-1,66	304.785.976.609	31.402.133.052	148.109.387.649	2
85	2020	kab pati	-1,15	371.708.005.192	40.287.107.342	101.021.374.734	3
86	2020	kab sukoharjo	-1,7	469.540.567.890	37.941.956.429	358.453.599.194	2
87	2020	kab pekalongan	-1,89	341.901.469.549	30.732.285.765	163.759.759.877	2
88	2020	kab cilacap	-10,36	591.343.787.160	1.809.803.783.042	324.581.581.509	4
89	2020	kab karanganyar	-1,87	384.682.993.533	38.472.361.000	177.762.280.332	1
90	2020	kab magelang	-1,68	115.530.759.532	38.366.292.995	287.691.856.102	2
91	2020	kab demak	-0,23	439.694.424.385	43.153.808.514	245.029.903.753	2

92	2020	kab batang	-1,29	257.422.866.095	38.023.663.336	122.728.564.505	1
93	2020	kab banjarnegara	-1,32	238.638.994.321	32.994.964.981	88.211.343.324	3
94	2020	kab brebes	-0,59	392.541.730.819	37.748.428.131	166.136.668.498	4
95	2020	kab kendal	-1,53	356.753.593.703	41.856.105.689	97.690.214.753	1
96	2020	kab grobongan	-1,59	350.453.524.065	47.375.762.998	134.760.672.754	3
97	2020	kab kebumen	-1,46	403.025.963.783	35.146.538.958	202.667.918.416	2
98	2020	kab sragen	-1,81	394.464.906.604	30.630.429.867	376.281.638.562	2
99	2020	kab wonogiri	-1,41	274.293.129.950	31.994.660.557	226.956.277.156	2
100	2020	kab temanggung	-2,13	307.488.084.365	52.880.696.555	123.395.072.830	1
101	2020	kab wonosobo	-1,66	251.724.091.045	36.659.004.117	148.138.414.810	2
102	2020	kab purbalingga	-1,46	313.618.688.781	32.048.138.782	129.990.361.009	1
103	2020	kab blora	-4,66	299.687.660.301	103.642.586.775	97.852.691.370	3
104	2020	kab jepara	-1,94	419.363.320.517	43.862.490.970	169.442.313.992	2
105	2020	kab tegal	-1,46	439.931.567.174	36.287.432.768	88.993.266.248	2

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dina Mei Eka, & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). *Prosiding SENDI_U 2018*, 33, 631–639.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Aziz Rachman Hakim, I. T. (2015). *penyebab silpa*. 3(7), 59–78.

- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dana, P., Umum, A., Dak, A. K., Dana, D. A. N., Hasil, B., Santoso, S. F., Bantasyam, S., & Astuti, S. B. (2021). (*Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019*). 1(September), 94–105.
- Diah Ayu Kharismadani, Y. H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018. *Surakarta Accounting Review (Sarev)*, 1(1), 26–33.
- entitas. (2009). *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Fahrezi, F., Hasanah, N., & Ulupui, I. G. K. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 141–157.
- FARALIZA, M. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 - 2018*. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Fathia & Rusdi. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 379–396. <http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.

- Habeabah, K. L. (2018). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL*. Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Salemba Empat. (Ed.)).
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (edisi 3). UPP STIM YKPN.
- Indonesia, K. K. R. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran*. 47–54.
- JUNIOR, D. H. M. (2014). uu no 23 tahun 2014. *Kementrian Keuangan*, 3(2), 1–46.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- kementrian keuangan. (2020). Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah. *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 35, 1–2.
www.kemenkeu.go.id/apbnkita%0Ahttps://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemantauan-dan-evaluasi-atas-realokasi-dan-refocusing-apbd-untuk-penanganan-covid-19-di-daerah/
- Kuncoro, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. *Journal of Chemical Information*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–445.
- Perimbangan, D., Sisa, D. A. N., Pembiayaan, L., Gede, D., Atika, Y., Putu, S., Ni, K., & Gde, L. (2017). *ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN / KOTA SE - BALI*. 9(1), 15–29.
- permendagri no 13 tahun 2006. (2006). *Permendagri No.13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*. 1–73.

- Prasetyo, D. A. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah.*
- Pusat, P. (2004). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445>
- Rizal, Y. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.* 3(1), 74–83.
- Sadono, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* PT. Rajagrafindo Persada.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance.* Deepublish.
- Saragih, J. P. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.2284>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, CV.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Rajawali Pers.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30.

<https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>

Thornton D, D. (2009). *Stewardship in Government Spending: Accountability, Transparency, Earmarks, and Competition*. Public Interest Institute.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. (2004). In *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* (Vol. 2004).

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>

UU NO 9 TAHUN 2020 tentang anggaran dan pendapatan belanja negara (Issue 051659). (2021).

Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 186–193.

<https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1892>

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://jateng.bps.go.id/>

Lampiran 1. Daftar Variabel Penelitian

No	Tahun	Kabupaten/Kota	PE	PAD	DBH	SILPA	BELANJA MODAL
1	2018	kota salatiga	0.058	208.926.057.032	24.417.997.942	258.254.809.426	222.021.981.988
2	2018	kota pekalongan	0.057	179.224.408.698	26.693.031.431	87.028.207.176	146.382.593.476
3	2018	kota semarang	0.065	1.821.274.103.250	168.784.359.874	176.328.459.834	1.228.459.434.270
4	2018	kota magelang	0.055	249.873.268.826	24.423.094.444	134.410.439.444	237.418.742.993
5	2018	kota surakarta	0.057	525.125.554.686	47.513.325.057	188.622.166.304	532.770.318.153
6	2018	kota tegal	0.059	275.021.448.594	25.571.473.848	165.566.574.307	113.622.507.976
7	2018	kab boyolali	0.057	342.957.213.726	42.900.294.604	146.431.243.026	498.972.083.904
8	2018	kab klaten	0.055	3.958.842.441.135	41.131.449.124	395.394.684.312	384.574.980.960
9	2018	kab rembang	0.059	296.676.436.263	41.011.687.494	75.692.630.540	309.448.505.895
10	2018	kab banyumas	0.065	648.326.914.034	42.908.155.816	53.134.107.182	525.416.939.614
11	2018	kab semarang	0.057	384.475.678.133	40.449.487.507	181.106.149.672	405.051.441.667